

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Strategi pembangunan di Indonesia selalu menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pemerintah sering kali mengusung visi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau daerah saja, tetapi juga merata ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Hal ini disebabkan karena administrasi pembangunan berfungsi sebagai alat negara untuk mempercepat dan menjalankan pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dalam segala aspeknya (Weidner, dkk dalam Ibrahim, 2009: 3). Selain itu, pembangunan di Indonesia juga mengutamakan pengembangan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, energi, dan teknologi informasi, untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan meningkatkan daya saing negara dalam era globalisasi. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan melakukan pemekaran wilayah sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Langkah ini dimaksudkan agar pembangunan dapat tersebar lebih merata dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan lebih efektif (Nidya : 2017).

Selain itu, pendekatan pembangunan di Indonesia juga semakin mengarah pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan mempertimbangkan tantangan perubahan iklim dan dampak negatif industrialisasi, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam upaya untuk membangun secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi dan kebutuhan pembangunan. Menurut Goulet dalam karya Theresia (2014: 2) menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup tiga aspek nilai, salah satunya adalah mencapai kemandirian, yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan kebutuhan lainnya.; b) Meningkatkan harga diri, yang berarti tumbuhnya kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan tanpa bergantung pada orang lain.; c) memperoleh kebebasan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa adanya tekanan eksternal. Melalui inisiatif-inisiatif seperti program untuk memperbaiki kondisi lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, Indonesia berusaha mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dengan pendekatan berkelanjutan seperti ini, ide pembangunan di Indonesia terus berkembang dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia bertujuan untuk mencapai kemajuan yang merata dalam upaya membangun bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pendekatan pembangunan yang mengabaikan peran masyarakat

cenderung menempatkan fokus utama pada aspek-aspek teknis dan kebijakan dari atas ke bawah, sering kali tanpa memperhatikan partisipasi aktif dan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, kebijakan dan program pembangunan dirancang dan diimplementasikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, atau pengetahuan lokal, sehingga masyarakat sering kali merasa terpinggirkan dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang proses pembangunan yang sedang berlangsung di lingkungan mereka. Pemerintah merupakan aktor utama yang memiliki kontrol penuh atas proses pembangunan, sementara masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat dari pembangunan tersebut. Konsekuensinya, pembangunan cenderung bersifat terpusat, atau seperti yang dijelaskan oleh Korten & Klauss (dalam Nasdian, 2014: 19). Akibatnya, masyarakat mungkin tidak merasa memiliki kepemilikan terhadap proses pembangunan, yang dapat menghambat kesuksesan jangka panjang program-program tersebut. Dampaknya, pendekatan pembangunan cenderung bersifat sentralistik, atau yang dikenal sebagai pembangunan berorientasi pada produksi (*production-centered development*) menurut Korten & Klauss (dikutip dalam Nasdian, 2014: 19). Pendekatan ini menekankan pada aspek teknis dan kebijakan dari atas ke bawah, tanpa memperhatikan partisipasi aktif dan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan. Sehingga, kebijakan dan program pembangunan sering kali tidak sesuai dengan kondisi lokal dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan utama pembangunan dapat dicapai melalui keterlibatan semua pihak yang terlibat dengan peran yang seimbang. Ini mencakup pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memberikan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan fokus pada pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, konsep pembangunan di seluruh tingkatan, baik nasional maupun komunitas, berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, pelestarian, hubungan sosial (kemitraan), serta prinsip keberlanjutan (Nasdian, 2014: 23). Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar, layanan publik, dan sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Sementara itu, sektor swasta memiliki peran penting dalam menyediakan investasi, teknologi, dan inovasi yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, muncul paradigma baru yang menjanjikan peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan, serta perlindungan lingkungan. Menurut Korten dalam Theresia (2014: 22), pendekatan ini disebut sebagai pembangunan yang berfokus pada manusia (*people-centered development*). Melalui keterlibatan dalam proyek-proyek infrastruktur, industri, dan layanan, sektor swasta dapat membuka peluang kerja, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan.

Kerjasama yang adil dan setara antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dianggap krusial dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif dari ketiga pihak ini, sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang beragam dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Paradigma tata kelola, atau yang lebih dikenal sebagai tata kelola yang baik, Santosa (2009:130) menekankan pentingnya kerja sama yang seimbang dan saling menguntungkan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Di sisi lain, Laksana (2013:56) menambahkan bahwa paradigma pembangunan ini menuntut keseimbangan di antara ketiga pihak tersebut. Laksana juga menegaskan bahwa tata kelola yang baik harus mengutamakan interaksi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai aspek. Selain itu, kerjasama yang adil juga membantu menciptakan legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap proses pembangunan, karena setiap pihak merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan keterlibatan dalam implementasi program-program pembangunan dan mendukung inisiatif- inisiatif yang diusulkan.

Dengan demikian, keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Mempertahankan keseimbangan antara ketiga pihak ini merupakan prinsip utama dalam upaya pembangunan yang efektif. Pengembangan wilayah

bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki keseimbangan antar wilayah, tetapi juga untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan di berbagai wilayah sesuai dengan potensi masing-masing (Nidya, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi apakah terdapat keseimbangan antara peran pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan, terutama di Desa Padusan. Meskipun pembangunan berjalan lancar, hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan judul “Strategi Pemerintah Desa Padusan Kabupaten Mojokerto dalam Pembangunan Infrastruktur Desa”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemerintah Desa Padusan Kecamatan Pacet sudah sesuai dalam pengembangan infrastruktur berdasarkan kondisi dan potensi desa dari tahun 2022-2024?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur di Desa Padusan Kecamatan Pacet antara tahun 2022-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: :

1. Untuk memahami Strategi Pemerintah Desa Padusan Kabupaten Mojokerto dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan kondisi dan potensi desa.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan infrastruktur di Desa Padusan Kecamatan Pacet.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang telah diuraikan, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan konsep serta teori bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa, serta memiliki peranan penting dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembangunan desa.